



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Masyarakat	- 90
	keg Meningkatkan Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	- 90
	Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase layanan ketatausahaan yang tepat waktu	- 100
	Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase layanan jasa penunjang tepat waktu	- 100
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	- Persentase barang milik daerah yang dipelihara	- 100
	- Meningkatkan Tertib Niaga Dan Mutu Produk	- Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	- 100
	keg Meningkatkan fasilitasi perlindungan konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase fasilitasi pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- 100
	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	- 80

Program

Keterangan

1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp370,324,400	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	= Rp231,960,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	= Rp28,045,700	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Rp48,606,800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Rp61,711,900	
2	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp1,077,726,800	APBD
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	= Rp945,669,400	
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	= Rp132,057,400	

Palu, 6 NOVEMBER 2025



**PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

DEDDY SUARMAN, SE., MM
Nip. 19691109 199903 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM**
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA,
Plt. SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perindustrian dan Perdagangan	- INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	- 66
Keg	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	- 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- 81
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	- 1. Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan - 2. Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	- 100 - 90
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	- Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	- 100
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	- Persentase barang milik daerah yang dipelihara	- 100
	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	- 1. Nilai Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah - 2. Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	- 80 - 80
	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	- 1. Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	- 4
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	- 2. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	- 91
	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	- 3. Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	- 100
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah	- 4. Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah - 5. Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	- 80 - 80
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	- 1. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah - 2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	- 90 - 88.31
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	- Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	- 80

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	= Rp. 19,207,409,045	APBD
Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	= Rp. 376,917,250	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	= Rp. 16,810,158,300	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Rp. 121,135,500	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	= Rp. 761,973,800	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	= Rp. 58,145,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Rp. 366,492,675	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	= Rp. 481,703,620	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	= Rp. 230,882,900	

Palu, 6 NOVEMBER 2025


PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RICHARD ARNALDO, SE.MSA
 NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
Pt. SEKERTARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
 NIP. 19821123 200604 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN DALAM NEGERI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha	- Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	- 100%
	Keg. Meningkatnya penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor	- Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor yang terlayani	- 100%
	Sub.keg Terlayannya permohonan Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP MB dan Bahan Berbahaya bagi Distributor melalui layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Persentase Permohonan Rekomendasi SIUP-MB dan B2 yang terlayani	- 100%
	Tersosialisasinya Peraturan perizinan Perdagangan bagi pelaku usaha	- Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perizinan Perdagangan	- 30 orang
	Terawasinya Pelaku Usaha B2 dan MB di Kabupaten/Kota	- Jumlah Pelaku Usaha B2 dan MB di Kabupaten/Kota (Kab. Banggai)	- 3 Pelaku Usaha
2	- Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata Dan Terintegrasi	- Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	- 10%
	Keg. Meningkatnya fasilitasi sarana prasarana perdagangan sesuai standar	- Persentase sarana prasaran perdagangan sesuai standar	- 10%
	Sub.keg Terbinanya Pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	- Jumlah pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	- 1 Kab/ Kota (Morowali)
	Sub.keg Terbinanya Pelaku Usaha yang difasilitasi di Pasar Lelang Komoditas	- Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi di pasar lelang komoditas	- 3 Pelaku Usaha
	Sub.keg Terevaluasinya pelaksanaan fasilitasi pasar lelang komoditas	- Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pasar lelang komoditas	- 1 Laporan
	Sub.keg Terfasilitasinya Pembentukan Managemen SRG di Kab. Toli-Toli dan Kota Palu	- Jumlah SRG yang terfasilitasi Pembentukan Managemennya	- 1 SRG
3	- Meningkatnya Kelancaran Distribusi Dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	- Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- 5,5%
	Keg. Meningkatnya jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	- Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	- 100%
	Sub.keg Termonitoringnya ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Subdistributor di 13 Kab/Kota	- Jumlah Laporan ketersediaan barang kebutuhan pokok ditingkat distributor dan subdistributor di 13 Kab/Kota	- 4 Laporan
	Sub.keg Terbinanya Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di 13 Kab/Kota	- Jumlah Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di 13 Kab/Kota	- 1 Kegiatan
	Sub.keg Termonitoringnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor di 13 Kab/Kota	- Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor di 13 Kab/Kota	- 4 laporan
	Sub.keg Terbinanya Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Penting di 13 Kab/Kota	- Jumlah Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Penting di 13 Kab/Kota	- 1 Kegiatan

	Keg. Meningkatkan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pengendalian Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kab/Kota yang ditindak lanjuti	-	90%	
	Sub.keg	Tersusunnya Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	Jumlah Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	1 Dokumen
	Sub.keg	Terpantaunya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota	-	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota	-	4 Laporan
	Sub.keg	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Pokok Murah dalam rangka Stabilisasi Harga	-	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar bersubsidi dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Pokok	-	20 Kegiatan
	Keg.	Meningkatnya pengawasan pupuk bersubsidi di tingkat daerah Provinsi	-	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	-	90%
	Sub.keg	Terkoordinasinya Penyaluran pupuk bersubsidi	-	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi	-	5 Laporan
4	-	Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada kegiatan pameran produk dalam negeri	-	10%
	Keg.	Meningkatnya keikutsertaan pelaku usaha pada kegiatan pameran produk dalam negeri	-	Persentase pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pameran produk dalam negeri	-	10%
	Sub.keg	Terfasilitasinya UMKM dalam keikutsertaan pameran produk dalam negeri	-	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam keikutsertaan pameran produk dalam negeri	-	2 UMKM
	Sub.keg	Tersusunnya Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	1 Laporan
	Keg.	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek produk dalam negeri	-	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	-	10%
	Sub.keg	Terfasilitasinya UMKM dalam Bimtek Digital Marketing produk dalam negeri	-	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam Bimtek Digital Marketing produk dalam negeri	-	80 UMKM
	Sub.keg	Tersusunnya Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	1 Laporan
	Keg.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya penggunaan produk dalam negeri	-	Persentase masyarakat yang paham pentingnya penggunaan produk dalam negeri	-	80%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 37,397,250	APBD
Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan	= Rp. 37,397,250	
Sub.keg Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	= Rp. 37,397,250	
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	= Rp. 99,354,400	APBD
Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi	= Rp. 99,354,400	
Sub.keg Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	= Rp. 39,792,900	
Sub.keg Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	= Rp. 44,979,000	
Sub.keg Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing Kabupaten/Kota dalam Provinsi	= Rp. 14,582,500	

3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	= Rp.	1,550,525,250	APBD
	Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	= Rp.	56,075,200	
	Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	= Rp.	35,756,750	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		20,318,450	
	Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	= Rp.	1,464,417,550	
	Sub.keg Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	= Rp.	181,879,650	
	Sub.keg Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	= Rp.	1,282,537,900	
	Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah	= Rp.	30,032,500	
	Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	= Rp.	30,032,500	
4.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	= Rp.	124,368,300	APBD
	Keg. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	= Rp.	51,457,600	
	Sub.keg Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	= Rp.	51,457,600	
	Keg. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	= Rp.	58,475,900	
	Sub.keg Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	= Rp.	58,475,900	
	Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	= Rp.	14,434,800	
	Sub.keg Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	= Rp.	14,434,800	



Palu, 6 NOVEMBER 2026

PIHAK PERTAMA
 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
 PERDAGANGAN DALAM NEGERI

DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
 NIP. 19770405 200212 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKO MARDIONO, S.T., M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

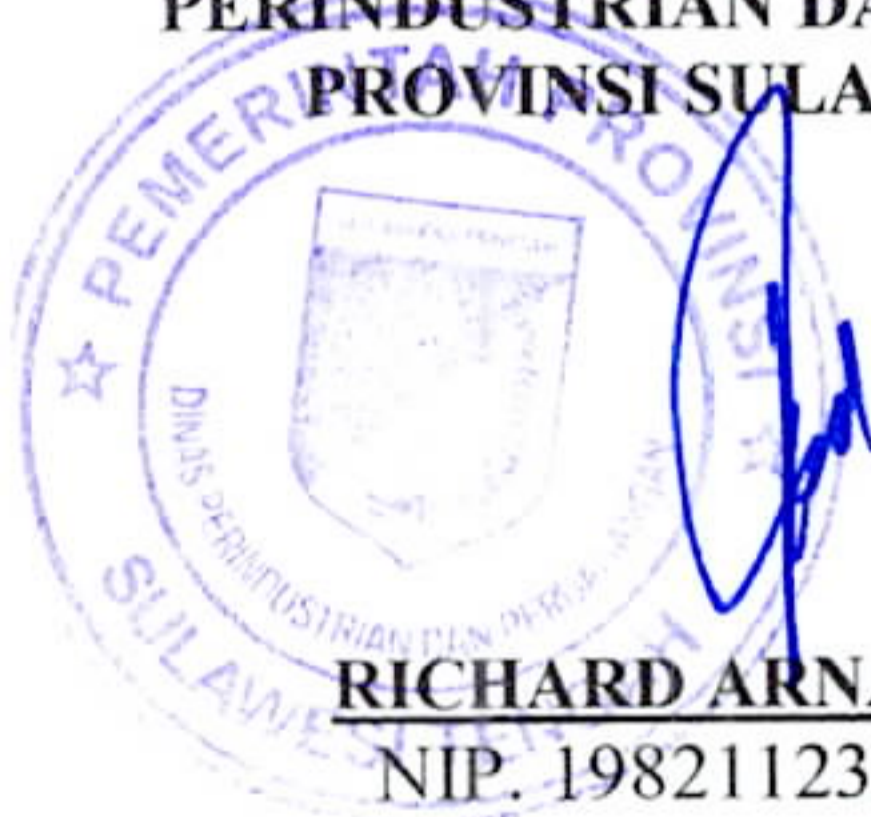
PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123N200604 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


EKO MARDIONO, S.T., M.A.P
NIP. 19770302 201001 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Meningkatkan realisasi Pembangunan Industri	- Persentase angkatan kerja yang terfasilitasi	- 100%
	Keg Terfasilitasinya angkatan kerja melalui kegiatan vokasi	- Jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi	- 50 Orang
	Sub.keg Tersusunnya dokumen teknis rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) Sulawesi	- Jumlah dokumen teknis rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) yang tersusun	- 1
	Sub.keg Terfasilitasinya penyusunan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota.	- Jumlah laporan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota yang terfasilitasi	- 1
	Sub.keg Tersedianya data fasilitasi Bina Pelaku Industri	- Jumlah Laporan fasilitasi Bina Pelaku Industri (Laporan)	- 1
	Sub.keg Terevaluasinya sasaran rencana pembangunan industri	- Jumlah Laporan Evaluasi sasaran rencana pembangunan industri (Laporan)	- 2
	Sub.keg Tersedianya Data Potensi Bahan Baku Industri	- Jumlah Data Potensi Bahan Baku Industri yang tersedia (Laporan)	- 1
	Sub.keg Terlatihnya Tenaga Kerja Industri	- Jumlah Tenaga Kerja Industri yang terlatih (orang)	- 15
	Sub.keg Terfasilitasinya HAKI	- Jumlah Sertifikat HAKI yang Terfasilitasi	- 45
	Sub.keg Tersosialisasinya Kebijakan P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.	- Jumlah sosialisasi terkait Kebijakan P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (sosialisasi)	- 1
	Sub.keg Terevaluasinya capain realisasi PDN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	- Jumlah laporan capaian realisasi PDN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang terevaluasi (laporan)	- 1
2	- Meningkatkan Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	- Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	- 100%
	Keg Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	- Persentase izin usaha Industri yang terawasi dan terkendali (%)	- 77%
	Sub.keg Terawasinya Perizinan Berusaha sektor perindustrian	- Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang terawasi	- 3
	Sub.keg Terkendalinya Perizinan Berusaha sektor perindustrian	- Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang terkendali	- 3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 622,934,000	APBD
Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp. 622,934,000	
Sub.keg Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	= Rp. 144,604,150	
Sub.keg Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	= Rp. 106,924,000	
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	= Rp. 371,405,850	

2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	= Rp.	183,910,850	APBD
	Keg Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	= Rp.	183,910,850	
	Sub.keg Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	= Rp.	125,207,900	
	Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	= Rp.	58,702,950	

Palu, 6 NOVEMBER 2025



PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

RICHARD ARNALDO, SE.MSA
 NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA
INDUSTRI

EKO MARDIONO, S.T., M.A.P
 NIP. 19770302 201001 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Meningkatkan Kemudahan Proses Perizinan Usaha Perdagangan luar negeri	- Persentase Izin Usaha Perdagangan luar negeri yang Difasilitasi	- 100%
	Keg Meningkatkan Pelayanan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) sesuai ketentuan yang berlaku	- Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) dan layanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani	- 100%
	Sub.Keg Terfasilitasinya Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	- Persentase Pelayanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani	- 100%
	Sub.Keg Tersosialisasinya Layanan Klinik Ekspor Sulteng bagi Mahasiswa sebagai upaya menumbuhkan ekosistem	- Jumlah mahasiswa tersosialisasi	- 40 orang
2	- Terwujudnya Pengembangan Ekspor	- Nilai ekspor	- 23.470,964 Juta USD
	Keg Meningkatkan Promosi bagi Produk Ekspor Unggulan Daerah	- Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi	- 100%
	Sub.Keg Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	- Jumlah Pelaku Usaha/produk yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	- 3 Pelaku Usaha
	Sub.Keg Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	- Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	- 27 Pelaku Usaha
	Sub.Keg Terevaluasinya Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Lokal	- Jumlah Laporan evaluasi Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Lokal	- 3 Laporan
	Terlaksananya FGD Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Go Ekspor	- Jumlah Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Go Ekspor yang mengikuti FGD	- 14 petani
	Teridentifikasinya Kualitas Kopi Sulawesi Tengah	- Jumlah Pelaku Usaha Kopi Sulawesi Tengah yang mengikuti identifikasi	- 15 penggiat kopi

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 113,651,400	APBD
Keg Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi	= Rp. 113,651,400	
Sub.Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	= Rp. 113,651,400	
2. Program Pengembangan Ekspor	= Rp. 614,146,350	APBD
Keg Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui	= Rp. 614,146,350	
Sub.Keg Pameran Dagang Internasional/Nasional	= Rp. 186,341,000	
Sub.Keg Pameran Dagang Lokal	= Rp. 332,014,200	
Sub.Keg Peningkatan Citra Produk Ekspor	= Rp. 95,791,150	

Palu, 6 NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



RICHARD ABNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR
NEGERI



FAJAR SETIAWAN, SE. MM
Nip. 19830304 200112 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAJAR SETIAWAN, SE, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

FAJAR SETIAWAN, SE, MM
NIP. 19830304 200112 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**

Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

HAPIT TOLLA,SE
NIP. 19731121 200701 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Masyarakat	- 90
Keg	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	- 90
	Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase layanan ketatausahaan yang tepat waktu	- 100
	Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase layanan jasa penunjang tepat waktu	- 100
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	- Persentase barang milik daerah yang dipelihara	- 100
	- Meningkatnya realisasi Pembangunan Industri	- Cakupan Bina Pelaku IKM (%)	- 15%
Keg	Terlaksananya fasilitasi layanan IKM	- Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	- 1069

Program	Anggaran	Keterangan
1		
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 784,053,125	APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 391,740,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 45,423,315	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 199,436,310	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 147,453,500	
2		
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 1,155,456,316	APBD
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Rp. 1,155,456,316	

Palu, 6 NOVEMBER 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN KERAJINAN DAERAH



HAPIT TOLLA, SE
NIP. 19731121 200701 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOLVANITA LADJIDJI, S.Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RICHARD ARNALDO, SE.MSA**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

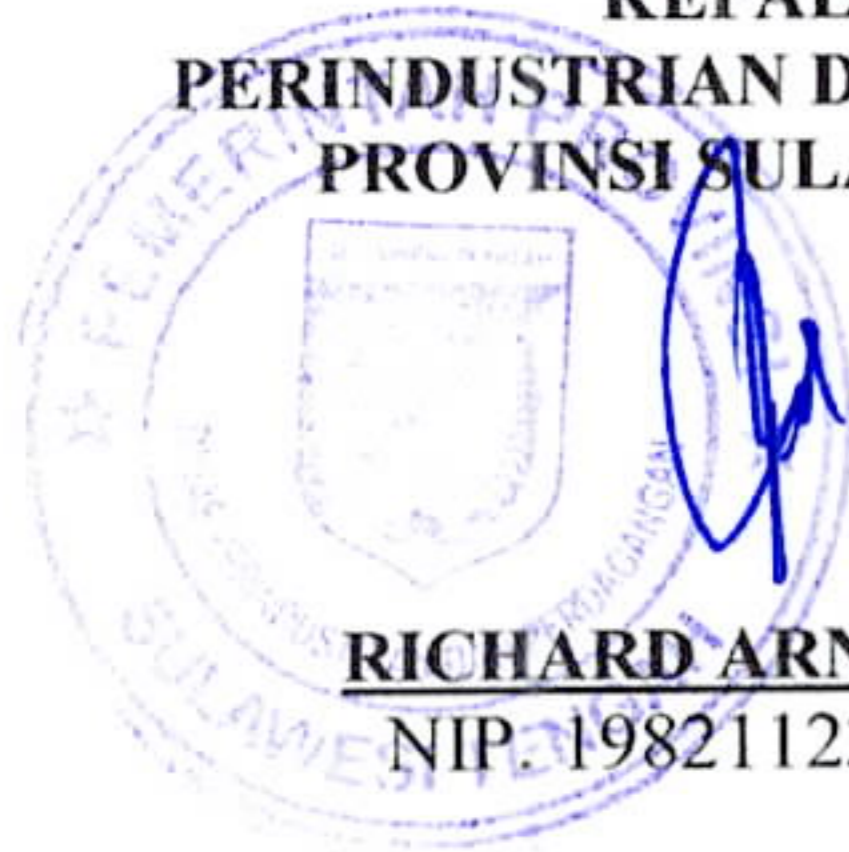
PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6-NOVEMBER 2025

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RICHARD ARNALDO, SE.MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU
BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOLVANITA LADJIDJI, S.Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Masyarakat	- 76,51-88,30
Keg	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	- 90
	Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase layanan ketatausahaan yang tepat waktu	- 100
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	- Persentase pengadaan Barang/Jasa tepat waktu	- 100
	Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase layanan jasa penunjang tepat waktu	- 100
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	- Persentase barang milik daerah yang dipelihara	- 100
	- Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk	- Persentase Layanan Pengujian dan Kalibrasi yang terakreditasi dan Non akreditasi	- 86%
Keg	Terlaksananya Kalibrasi alat ukur industri dan usaha berdasarkan standar internasional (SI)	- Persentase kalibrasi alat ukur ukur industri dan usaha berdasarkan standar internasional (SI)	- 100
	Terlaksananya Pengujian mutu komoditi berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	- Persentase pengujian komoditi berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	- 100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 7,193,857,805	APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	= Rp. 284,430,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	= Rp. 83,813,113	
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	= Rp. 6,503,948,876	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Rp. 264,726,848	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	= Rp. 126,367,292	
2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 529,227,358	APBD
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	= Rp. 440,935,431	

Palu, 6 NOVEMBER 2025



PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

NOLVANITA LAJIDJI, S. Ag. M.M
NIP. 19730801 200701 2 029